

GELIAT MAJLIS TAKLIM DI INDONESIA KONTEMPORER

Rika Hidayana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Email : rikahidayani26051@gmail.com

Abstrak: Artikel ini ingin mengemukakan bahwa politik dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun aspek pendidikan yang tersentuh oleh kepentingan politik adalah pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Ta lim. Upaya-upaya Pemerintah Orde Baru dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Majelis Ta lim agar tidak digunakan sebagai sarana politik praktis antara lain dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, dan Instruksi Menteri Agama RI. Nomor 5 tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meredam kepentingan-kepentingan politik Islam dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umat Islam. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut dilakukan melalui 1) pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh umat Islam, 2) membentuk organisasi-organisasi yang menampung aspirasi umat Islam seperti, ICMI, DKMI, KODI dan lain sebagainya, 3) merespon aspirasi umat Islam dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam, seperti pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan SDSB, dan lain-lain, 4) memenuhi aspirasi kepentingan umat Islam seperti membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok daerah, pembentukan Bank Muamalat, pengiriman da i-da i ke daerah transmigran, dan lain-lain.

Kata Kunci: Orde Baru, Majelis Ta lim, Politik, Pendidikan

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan negara, intervensi pemerintah terhadap institusi pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Di dunia Islam misalnya, keberadaan Madrasah Nizhâmiyah yang didirikan oleh penguasa Bani Saljuk, Nizhâm al-Mulk (bermadzhab Sunni), memiliki kepentingan-kepentingan

dalam mengikis dan menghadang paham-paham Syi'ah dengan mendirikan Madrasah Nizhâmiyah di setiap kota di Irak dan Khurasan (Mukti, 2017). Hal ini dilakukan mengingat melalui institusi pendidikan madrasah merupakan media yang cukup efektif dalam proses transformasi pendidikan dan sosialisasi pemahaman keagamaan maupun politik (Easton, 2007). Hubungan kedua institusi ini, saling membutuhkan satu sama lain. Penguasa menghendaki eksistensi kekuasaan, sementara madrasah membutuhkan dana-dana finansial untuk melestarikan budaya akademisnya (al-nahlawy). Dengan demikian dapat diketahui bahwa politik pendidikan dalam dunia Islam memang telah ada sejak masa awal pelebagaan institusi pendidikan.

Dalam keterkaitan kebijakan (Imron, 1996) pemerintah terhadap pendidikan terdapat teori-teori yang mendukung adanya hubungan antara politik dan pendidikan, ada pula yang menolak hubungan antara keduanya. Tokoh yang menolak hubungan antara politik dan pendidikan di antaranya adalah Thomas H. Eliot (Sirozi, 2007) dan Edward Said (Said, 1978).

Majelis Ta lim (Hasbullah, 1995) sebagai sebuah sistem pendidikan Islam nonformal merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, bahkan dalam dunia Islam, meskipun pada saat itu belum dikenal dengan istilah Majelis Ta lim (Joesoef, 1992). Hal ini dikarenakan Majelis Ta lim selain sebagai sarana pendidikan, ia dijadikan pula sebagai media dakwah yang cukup efektif, sehingga keberadaan Majelis Ta lim tidak dapat terlepas dengan unsur-unsur dakwah Islam yang sudah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad saw (Mukti, 2007). Otoritas Majelis Ta lim sebagai pendidikan yang berbasis pada masyarakat merupakan keunikan tersendiri jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya (Tirtarahardja, 2005).

Sementara masa Orde Baru merupakan masa di mana kepentingan politik antara umat Islam dengan pemerintah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Hal ini ditandai antara lain oleh; 1) ditumbangannya Orde Lama melalui proses kudeta yang gagal. Dalam hal ini pemerintah Orde Baru dibantu oleh tokoh-tokoh dan Ormas Islam dalam menumpas kelompok PKI; 2) terdapat upaya depolitisasi politik Islam dengan diberlakukannya restrukturisasi partai menjadi dua partai (PPP dan PDI) serta Golkar; 3) implementasi asas tunggal terhadap partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan; 4) hubungan represif pemerintah terhadap umat Islam dengan keluarnya kebijakan-kebijakan yang dinilai mendiskreditkan kepentingan umat Islam; 5) munculnya kelompok intelektual muda yang mampu mengakomodasi harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan umat Islam; 6) perubahan sikap pemerintah kepada sikap akomodatif terhadap kepentingan umat Islam dengan ditandai masuknya para tokoh-tokoh Islam dalam Kabinet Pembangunan IV dan V (Ihzhamaendra, 2008) .

Dalam penulisan makalah ini, penulis memfokuskan keterkaitan antara kepentingan pemerintah Orde Baru dengan Majelis Ta lim melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengkaji kebijaksanaan pemerintah Orde Baru didasarkan pada; 1) masa pemerintahan Orde Baru paling lama, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang; 2) banyak terjadi intrik-intrik politik dalam upaya mengukuhkan kekuasaannya; 3) terdapat pasang surut hubungan pemerintah dengan Islam; 4) Majelis Ta lim merupakan sarana yang rentan terhadap konflik kepentingan (Latif, 2005).

Dalam hal ini, Majelis Ta lim memiliki potensi konflik dari aspek agama, organisasi, intervensi pemerintah dan respons atas kemajuan. Kedudukan Majelis Ta lim sebagai sebuah sistem lembaga ke-Islaman, memiliki akar yang kuat dalam sub bidang keagamaan Islam yakni; dakwah dan pendidikan. Dalam aspek dakwah, potensi konflik muncul ketika berdialog dengan kepentingan agama, sekte dan politik. Hal tersebut tampak ketika Majelis Ta lim menjadi sarana penyebaran paham-paham madzhab atau golongan. Di sisi lain, organisasi politik juga memanfaatkan Majelis Ta lim sebagai sarana pembentukan opini public (Mehdem, 1999). Demikian juga pemerintah sendiri mempunyai kepentingan dalam proses sosialisasi program-programnya. Sementara dalam aspek pendidikan,

Majelis Ta'lim juga menjadi sarana dalam pelestarian tradisi akademis melalui kajian- kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh kalangan umat Islam.

Pembahasan

1. Majelis Ta'lim dan Politik Penguasa Orde Baru

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Majelis Ta'lim dan lembaga pendidikan Islam lainnya cukup baik. Hal ini tampak dari munculnya kegiatan-kegiatan pengajian baik yang diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan maupun oleh pemerintah sendiri. Namun demikian hubungan akomodatif pemerintah Orde Baru terhadap geliat kegiatan keagamaan umat Islam pada periode-periode awal masa Orde Baru sempat mengalami ketegangan yakni pada tahun 1968 hingga 1980. Sementara, pada masa-masa berikutnya, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam, termasuk Majelis Ta'lim, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir, 1980-1990. Hal ini dimungkinkan karena tekad Orde Baru yang sangat kuat untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di samping itu juga karena pendekatan politik Orde baru yang akomodatif dalam menghadapi kepentingan aspirasi ummat Islam Indonesia (Ali, 1986).

Dengan formasi politik seperti itu, pemerintahan Orde Baru dapat menangkal sekaligus gerakan-gerakan politik Islam yang dikhawatirkan muncul – sebagaimana sudah pernah muncul pada masa Orde Lama. Orde baru memberikan perhatian yang sangat serius dalam menekan kemungkinan munculnya radikalisme Islam traumatik yang memperjuangkan pembentukan negara Islam sebagaimana dilakukan oleh Pemberontakan DI/TII, Gerakan Ibnu Hajar, Pemberontakan Batalyon 426 Jawa Tengah, dan Peristiwa Aceh Merdeka (Moertopo, 1974).

Dalam bidang pendidikan, ketegangan antara aspirasi ummat Islam dengan kebijakan pemerintah muncul terutama menyangkut usaha yang melemahkan posisi bidang studi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sejalan dengan kekuatan politik dari kalangan penganut aliran kepercayaan, pemerintah memberikan porsi yang sangat dominan pada bidang studi Pendidikan Moral Pancasila. Kebijakan ini selanjutnya mengarah pada privatisasi agama- dengan pengertian bahwa

agama merupakan masalah pribadi- sehingga institusi tidak terlibat secara langsung dalam masalah-masalah pembinaan keimanan siswa. Dalam hal ini pernah direncanakan penggantian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran Panca Agama dengan alasan untuk pembinaan nalar dan wawasan siswa dalam memahami agama (Noer, 1983).

Salah satu usaha melemahkan pendidikan agama, khususnya bagi umat Islam, adalah menutup setiap kesempatan yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan siswa. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan cenderung dibatasi, termasuk kesempatan untuk mengenakan kerudung bagi para siswa Muslimah. Dalam banyak kasus kepala sekolah sering mengeluarkan siswi-siswi Muslimah karena alasan mengenakan kerudung (jilbab) (Kanwil & Dikbud, 1997). Para siswa-siswi Muslimah juga tidak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam organisasi-organisasi pelajar Islam dengan alasan OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa (Dasmen, 1980).

Dengan demikian Majelis Ta lim pada masa Orde Baru memiliki arti tersendiri, mengingat pada periode ini Majelis Ta lim menjadi akar konflik kepentingan antara pemerintah dan politik Islam. Pemerintah memandang bahwa Majelis Ta lim cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok politik Islam yang dinilai mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman karena forum Majelis Ta lim digunakan sebagai sarana agitasi politik. Sementara bagi kelompok politik Islam memanfaatkan sarana Majelis Ta lim untuk ajang *amar ma ruf nahy munkar* (memerintahkan kebaikan dan melarang pada perbuatan kemunkaran). Hal ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendiskreditkan umat Islam dianggap sebagai sebuah kemunkaran yang harus ditentang (Karim, 1985). Pada masa-masa akhir Orde Baru, hubungan akomodatif pemerintah terhadap kepentingan umat Islam²⁴ melahirkan perkembangan yang cukup signifikan bagi pertumbuhan Majelis Ta lim di Indonesia (Ismail, 1999). Oleh karena itu, Majelis Ta lim pada masa itu terpola pada tiga sikap yang berbeda terhadap pemerintahan Orde Baru, yakni 1) sikap pro terhadap pemerintah; 2) sikap kontra terhadap pemerintah; dan 3) sikap netral terhadap pemerintah.

a. Pro Pemerintah

Terbentuknya Golongan Karya sebagai salah satu kontestan Pemilu pada masa-masa awal Orde Baru merupakan strategi Pemerintahan Soeharto untuk dapat tetap mempertahankan kekuasaannya (Syamsudin, 2003). Kelahiran Golkar (20 Oktober 1964) merupakan reaksi dan repon terhadap situasi politik dalam negeri yang kacau balau. Situasi yang tidak menguntungkan bangsa dan negara, karena tidak terjaminnya keamanan akibat ulah para pengacau (partai politik) dan konflik politik di dunia kepartaian, mengundang pemikiran pemerintah untuk mendayagunakan ABRI guna mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang (Lubis, 1994). Pendayagunaan ABRI dalam menetralkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tengah mengalami kegoncangan tersebut, dirasa tidak akan mungkin terwujud tanpa peran serta masyarakat. Untuk itu ABRI merasa perlu mengajak kelompok-kelompok yang tidak berafiliasi pada partai politik (yang sering disebut dengan Golongan Fungsional, seperti guru, nelayan, petani, tentara, ulama, ilmuwan, polisi), untuk bersama-sama memikirkan dan melaksanakan tugas tersebut.

Meskipun Golkar (Golongan Karya) tidak menyebut dirinya sebagai partai, namun keterlibatannya dalam pemilihan umum merupakan bukti bahwa kehadirannya mempunyai kepentingan politik untuk mendukung pemerintah Orde Baru. Sebagai organisasi kekartayuan yang merangkul kelompok-kelompok militer, agama, pemuda, buruh, pengusaha dan kelompok-kelompok non-ideologis lainnya merupakan upaya perlawanan terhadap dua kelompok politik baik Islam maupun nasionalis.

Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu tahun 1971 dengan mengantongi suara hingga 73 persen, mempunyai indikasi pemerintah untuk membantu Golkar memenangi pemilu melalui persiapan dan strategi yang efektif (Syamsudin, 2003). Dari fakta tersebut, tampak bahwa pembentukan Golkar sangat terkait erat dengan agenda pemerintah Orde Baru dalam upaya memperkuat hegemoninya. Hubungan saling menguatkan ini disinyalir karena adanya kepentingan antara satu dengan lainnya. Pemerintah membantu Golkar untuk memenangi pemilu dengan bantuan-bantuan finansial, sementara Golkar membantu pemerintah

dengan basis dukungan massa yang cukup signifikan.

Selain itu, keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam membantu kepentingan Golkarpun menjadi faktor kemenangan Golkar dalam setiap pemilu pada masa Orde Baru. Upaya yang dilakukan oleh Golkar dalam merangkul umat Islam di Indonesia salah satunya ialah dengan membentuk organisasi sayap yang mengakomodir kepentingan umat Islam, salah satunya dengan membentuk kegiatan Majelis Ta lim Al-Hidayah dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Beberapa alasan pengelompokan Majelis Ta lim yang bersikap pro pemerintah Orde Baru didasarkan kepada beberapa asumsi; 1) secara struktural lembaga tersebut mempunyai hubungan dengan Pemerintah Orde Baru atau partai pendukung Orde Baru (Golkar); 2) secara fungsional, para tokoh-tokoh Majelis Ta lim tersebut mempunyai hubungan struktural maupun emosional dengan pemerintah Orde Baru; 3) adanya sikap akomodatif dan support pemerintah terhadap eksistensi Majelis Ta lim tersebut. Adapun beberapa Majelis Ta lim yang mempunyai kecenderungan pro terhadap pemerintah Orde Baru antara lain;

- 1) Majelis Ta lim Al-Hidayah (Syamsudin, 2003).
- 2) KODI (Koordinasi Dakwah Islam) (Baedlawi, 2003).
- 3) Majelis Ta lim Kwitang (Umar, 1995).
- 4) BKMT (Badan Kontak Majelis Ta lim) (Alawiyah, 1999).

b. Kontra Pemerintah

Sikap kontra terhadap pemerintah ini, penulis deskripsikan dari; 1) sikap-sikap politis para tokoh maupun jama ah Majelis Ta lim yang cenderung tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah; 2) para tokoh-tokoh Majelis Ta lim mempunyai pandangan ideologi yang berbeda-jika tidak disebut berseberangan dengan ideologi penguasa Orde Baru, dalam hal ini ideologi Pancasila; 3) sikap depresif pemerintah terhadap Majelis Ta lim tersebut. Setidaknya penulis dapat mengelompokkan Majelis Ta lim yang cenderung bertentangan dengan Pemerintah Orde Baru pada dua kelompok besar, meskipun tidak menutup kemungkinan masih terdapat contoh-contoh yang lain. Dua contoh Majelis Ta lim tersebut

adalah;

- 1) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Hakim, 1992).
- 2) Pengajian Usrah (Syukur, 2001).

c. Netral

Pengelompokan BMMT pada posisi netral terhadap pemerintah Orde Baru didasarkan pada; 1) materi penyampaian dalam kegiatan Majelis Ta limnya lebih bersifat kajian keagamaan yang menfokuskan pada pengajian kitab-kitab; 2) afiliasi politik para jama ah Majelis Ta lim yang dikelola oleh BMMT terdiri dari kalangan homogen; adakalanya merupakan basis massa Partai Persatuan Pembangunan maupun basis massa Golkar; 3) sikap politik tokoh BMMT (KH. Syafi i Hadzami), meskipun beliau merupakan tokoh di kalangan massa PPP, namun tidak menghalanginya untuk merangkul semua ummat (Hadzami M. S., 1999).

Sementara dari lingkungan Habaib, beliau belajar kepada Habib Ali bin Husen al Aththas, Habib Ali Bungur, dan Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi. Sebagai seorang ulama hasil produksi pendidikan Majelis Ta lim di Betawi, KH. Syafi i Hadzami memberikan arti tersendiri bagi keberadaan Majelis Ta lim di tanah Betawi. Keberhasilan majelis-Majelis Ta lim di Betawi dalam mencetak ulama, menurut KH. Drs. Saifuddin Amsir paling tidak disebabkan oleh dua hal; yaitu, *pertama*, tidak adanya batasan waktu, seperti SKS di perguruan tinggi, untuk menyelesaikan satu disiplin ilmu atau satu kitab; *kedua*, anak didik atau murid mempunyai kebebasan waktu dan kesempatan untuk menanyakan dan menyelesaikan pelajaran yang tidak ia pahami kepada gurunya; dan *ketiga*, anak didik atau murid langsung dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. hasilnya, dalam beberapa kesempatan telah teruji bahwa lulusan Majelis Ta lim memiliki pemahaman ilmu agama yang lebih mendalam dari pada lulusan perguruan tinggi Islam. Bahkan menurutnya, tidak sedikit para sarjana bidang Islam yang bergelar doktor dan profesor menjadikan lulusan Majelis Ta lim sebagai tempat bertanya tentang masalah-masalah yang pelik di bidang ke Islaman (taklim, 2015).

Argumentasi Saifuddin Amsir tersebut cukup beralasan jika melihat materi-materi kitab yang diajarkan pada forum-forum Majelis Ta lim yang merupakan kitab-kitab klasik yang tidak diajarkan pada perguruan tinggi. Kitab-kitab tersebut antara lain; *Hidâyah al Atqiyâ* , *Syarh al Hikâm*, *Kifâyah al Hidâyah al Atqiyâ* , *Anwâr Masâlalik*, *Tanbih al Mughtârrîn*. Kesemua itu merupakan kitab *tashawwur*. Sementara untuk kitab Fiqh antara lain dikaji; *Sab ah Kutub Mufidah*, *Fath al Mu in*, *Bidâyah al Mujtahid*; sedangkan untuk kitab Hadits antara lain; *Riyâdh al Shâlihîn*, *Shohîh Buchâri*, *Shohîh Muslim*; *Nailu al Authâr*; sedangkan kitab tafsir yang digunakan antara lain; *Tafsîr Ibn al Katsîr*, *Tafsir al Nasâfi*; *Al Itqân fi Ulûmi al Qur ân*; untuk kitab sejarah digunakan kitab; *tarikh Muhammad*, *Nûr al Yaqîn*, dan lain-lain (Ibid, 1995).

Sementara itu, selain mengajarkan ilmunya melalui kegiatan Majelis Ta lim, beliau juga menghasilkan karya-karya tulis, antara lain 102; 1) *Sulâmu al'Arasy fi Qirâ'at al Warsy*; 2) *Qiyâs „Adâlah al Hujjah al Syar'iyah*; 3) *Qabliyah al Jum'ah*; 4) *Shalâtu al Tarâwih*. 5) *'Ujâlah Fidyah al Shalâh*. 6) *Mathmah al Rubâ fi Ma'rifah al-Ribâ* 7) *Al Hujaju al Bayyinah* (Hadzami K. S., 2015).

Salah satu kitab yang menjadi *masterpiece* beliau adalah *Taudhih al Adillah*. Kitab ini menjadi rujukan untuk menjawab persoalan-persoalan fiqh kontemporer, yang berisi tanya jawab beliau saat menjadi nara sumber di Radio Cendrawasih. Kehadiran BMMT merupakan perwujudan untuk mengkoordinasi Majelis-majelis Ta lim tempat Syafi i Hadzami mengajar. Ide berdirinya BMMT ini datang dari Syafi Hadzami sendiri. Badan ini dibentuk setelah memperhatikan kesungguhan dan ketekunan para jama ah majelis-Majelis Ta lim dalam menuntut ilmu. Dalam musyawarah susunan pengurus yang diadakan pada tanggal 7 April 1963 BMMT ini diberi nama Al-„Asyirotusyafi iyah (Ibid, 1995).

Badan musyawarah Majelis Ta lim Al-„Asyirotusyafi iyah semakin hari semakin berkembang. Maka dalam rangka melancarkan program dan usahanya di bidang sosial, pendidikan/pengajaran para pengurus merasa sangat perlu untuk meningkatkan organisasinya menjadi badan hukum dalam bentuk yayasan. Para penguruspun sepakat untuk melakukan musyawarah untuk persiapan yang diperlukan organisasinya menjadi yayasan. Tepat pada tahun 1975 dengan akte

notaris M.S. Tadjoen no. 228 tertanggal 30 Juni 1975, terbentuklah suatu yayasan yang bernama yayasan BMMT Al-„Asyirotusyafi iyah dengan ketua umumnya KH. Muhammad Syafi i Hadzami (Ibid, 1995).

Dalam bidang sosial yayasan BMMT Al-„Asyirotusyafi iyah lebih menggiatkan para jama ah Majelis Ta lim dalam pembinaan mental dan gotong royong di segala bidang kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan dalam bidang pendidikan Yayasan BMMT Al-„Asyirotusyafi iyah mempunyai cita-cita melalui tiga jalan usaha;

1. Melalui majelis-Majelis Ta lim, yayasan memberikan penyuluhan secara lisan maupun tulisan bagi jama ah Majelis Ta lim pada khususnya dan warga ibukota umumnya kearah kemajuan dan pengetahuan ilmu agama Islam dan pengembangan jiwa ibadah.

2. Melalui penyelenggaraan kursus-kursus yang intensif dan terarah, berusaha secepatnya untuk dapat mencetak sebanyak mungkin guru-guru agama, muballigh dan lainnya, pria maupun wanita, untuk dapat mengisi kekurangan.

3. Penyelenggaraan pendidikan pesantren, berusaha untuk membangun generasi muda Islam melalui penyediaan fasilitas ruang kehidupan belajar untuk para pemuda dan pemudi Islam dididik menjadi penerus para ulama yang dinamis dan militan untuk membangun masyarakat Ibukota yang beragama (Ibid, 1995).

Dalam kiprah dakwahnya KH. Abdullah Syafe i Hadzami memiliki peranan besar dalam dakwah dan pendidikan di lingkungan Majelis Ta lim di Jakarta, mengingat KH. Syafi i Hadzami merupakan da i yang disegani oleh jama ahnya. Bahkan dari kegiatan Majelis Ta lim yang semakin terorganisir melalui BMMT, pada masa-masa berikutnya terbentuklah lembaga pendidikan Al-

„Asyirotusyafi iyah yang menyelenggarakan pendidikan non formal dan formal. Non formal seperti, TPA dan Pesantren Al Arbain. Sementara pendidikan formalnya berbentuk TK hingga tingkat Aliyah (Hadzami K. S., 2015).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka kiprah dakwah yang dikembangkan oleh Abdullah Syafi'i Hadzami, tidak memiliki tujuan-tujuan politis yang bernuansa mendukung pemerintah Orde Baru atau menentanginya. terlebih lagi, dari

materi-materi pengajian yang disampaikan berkisar kepada masalah-masalah pembahasan kitab kuning.

2. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim

Masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sejak runtuhnya rezim Soekarno dan naiknya rezim Soeharto pada tahun 1966 sampai runtuhnya kembali rezim Soeharto oleh gelombang reformasi pada tahun 1998. Peralihan dari Orde Lama di bawah rezim Soekarno ke Orde baru di bawah rezim Soeharto berawal dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh partai Komunis Indonesia (PKI) untuk membersihkan para Jenderal Angkatan Darat yang tergabung dalam sebutan „Dewan Jenderal yang dinilai mengancam kekuasaan Soekarno (Susanto, 1994). Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal yaitu Letjen. A. Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen. S. Parman, Mayjen Haryono MT, Brigjen Soetojo S., dan Brigjen. DI. Panjaitan, sementara Jend. AH. Nasution yang juga merupakan target mereka berhasil lolos (Susanto, 1994).

Setelah hancurnya kekuatan komunis di Indonesia, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto-pun mulai menata dan memapankan kekuasaannya. Untuk membedakan dirinya dengan rezim Orde Lama, pemerintah Orde Baru mendefinisikan dirinya sebagai berikut:

1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.
3. Sebuah tatanan yang membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum.
4. Sebuah tatanan hukum dan pembangunan. (Ismail, ideologi hegemoni, 1999)

Dengan demikian, Orde Baru merupakan rezim yang berkeinginan melakukan upaya koreksi terhadap rezim Orde Lama yang dianggap telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan mengupayakan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur (sejahtera) secara material dan spiritual. Pada era tahun 1970 hingga 1980 dakwah Islam terasa mengalami hambatan secara politis, hal ini disebabkan hubungan pemerintah dengan Islam politik yang cenderung represif. Islam dipandang sebagai ideologi yang membahayakan bagi kedaulatan negara, sehingga gerak politiknya harus dibatasi (Suminto, 1985).

Setelah pupusnya harapan upaya menegakkan Islam melalui jalur politik, sebagian politisi Muslim tetap melanjutkan perjuangannya melalui jalur dakwah. Dalam kegiatan pengajian-pengajian dan forum-forum dakwah, para politisi tersebut tidak jarang mengeluarkan kritik-kritik pedas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendiskreditkan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, Pemerintah memandang mereka sebagai rival yang mengancam stabilitas nasional dan mengganggu proses gerak laju pembangunan. Para perwira ABRI yang menjadi kunci dalam aparat pemerintah⁶ seperti M. Panggabean (1969/1973), Sudomo, (1974/1983), LB. Moerdani (1983/1988), pada saat M. Panggabean menjabat Komkamtib, melakukan kontrol terhadap para aktivis muslim dengan mengharuskan setiap da'i untuk mendapatkan izin dalam setiap berdakwah (Latif, 2005).

Deliar Noer; mengungkapkan bahwa “Banyak ulama dilarang berkhotbah pada suatu waktu atau waktu yang lain. Banyak di antara mereka yang telah dipenjarakan. Pada tahun 1978, ketika MPR bersidang untuk memilih Presiden, sejumlah pemimpin Muslim termasuk Bahbub Djunaedi (Sekretaris PPP dan mantan anggota Aliansi Jurnalistik Indonesia), Ismail Sunny (Profesor Hukum Tata Negara UI dan Rektor Universitas Muhammadiyah), Soetomo (Bung Tomo, Pahlawan Nasional dari Surabaya yang pada tahun 1977 membela gerakan Darul Islam melawan tuduhan yang melewati batas dari seorang pejabat), telah ditahan. Demikian juga dengan Imaduddin Abdulrahim seorang dosen ITB yang aktif dalam gerakan dakwah di dalam dan di luar negeri” (Noer, 1983).

Disisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok umat Islam yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Kelompok ini secara ideologis memang memiliki haluan yang berbeda dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya pemerintah selalu mengambil sikap tegas dalam menangani mereka. Beberapa kejadian yang sempat mencuat dari tindakan tegas pemerintah terhadap gerakan ini antara lain adalah penanganan Gerakan Komando Jihad (Komji) (chaidar, 2000). Meskipun memiliki beberapa kontroversi, namun isu gerakan ini menjadi alasan pemerintah dalam hal ini Kopkamtib untuk melakukan *swiping* terhadap kegiatan dakwah di Majelis-majelis Ta lim, meskipun untuk Majelis Ta lim yang dinilai pro pemerintah (seperti Al-Hidayah) mendapat perlakuan berbeda (Jenkis, 1998).

Kontroversi dari peristiwa Komando Jihad adalah disinyalir bahwa munculnya Gerakan Komando Jihad merupakan hasil rekayasa dari Opsus yang antara lain bertujuan menimbulkan situasi tidak harmonis antara umat Islam dan pemerintah (Mubarok, 2008). Dari beberapa data tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Kopkamtib, merasa perlu mewajibkan agar para da'i meminta izin sebelum berceramah dan melampirkan materi ceramahnya. Namun demikian, sikap tersebut dinilai oleh sebagian tokoh-tokoh Islam sudah keterlalu. Karena hal ini justru akan memperuncing keadaan.

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 44 Tahun 1978, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama memutuskan antara lain, bahwa:

1. Pelaksanaan Dakwah agama dan kuliah shubuh melalui Radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu, dengan ketentuan;
 - a) tidak mengganggu stabilitas nasional,
 - b) tidak mengganggu jalannya pembangunan nasional;
 - c) tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Aparat Departemen Agama berkewajiban memberikan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan dakwah agama dan kuliah shubuh melalui radio di daerah wewenang masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (RI, 1985).

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri tersebut, maka diinstruksikan kepada Kepala Departemen Agama Propinsi/settingkat se-Indonesia melalui Instruksi Menteri Agama No. 9 Tahun 1978. Dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 Tahun 1978, dijelaskan tentang pengertian dakwah Agama; yakni dakwah Agama Islam yang meliputi antara lain; 1) Pengajian-pengajian baik harian, mingguan, tengah bulan atau bulanan; 2) Majelis-Majelis Ta lim di Mesjid, di Pesantren atau di Madrasah atau di rumah-rumah baik untuk kaum Ibu, para bapak, campuran atau khusus untuk pemuda dan remaja; 3) peringatan-peringatan hari besar Islam; 4) Upacara-upacara keagamaan; 5) ceramah-ceramah keagamaan yang dilaksanakan ditempat-tempat tertentu; 6) Drama atau pertunjukan kesenian bernafaskan agama; 7) usaha untuk maslahat orang banyak (Ibid, 1995). Upaya Menteri Agama pada saat itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam mensosialisasikan keputusan tersebut sebagaimana disampaikan pada pidato sambutannya dalam Seminar Dakwah Islam se-Sumatera Utara Medan tanggal 29 Maret 1981, ia mengungkapkan bahwa latar belakang Keputusan Menteri Agama tersebut didasarkan pada tanggung jawab pemerintah dalam membina kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Majelis Ta'lim, ungkapan Menteri Agama tersebut, terkait dengan pelaksanaan Majelis Ta lim yang cukup semarak diselenggarakan di masjid-masjid. Melalui ungkapan dari Meteri Agama tersebut, maka kegiatan Majelis Ta'lim yang diselenggarakan di masjid-masjid menjadi terbatas dalam masalah-masalah „*ubudiyah* saja, tidak boleh menyinggung masalah-masalah *mu amalah* sesama manusia termasuk hal-hal yang bernuansa politik. Padahal, selain masalah *ukhrawiyyah*, Islam juga mengatur masalah- masalah *dunyâwiyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, jika tidak bisa disebut dengan “politik”. Hubungan Islam dengan politik pada dasarnya telah menjadi perdebatan dikalangan umat Islam, ada yang menyatakan bahwa Islam juga mengatur masalah-masalah politik, ada juga yang tidak mengakuinya (Ma'arif, 1999).

Pada hakikatnya secara konseptual kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam hal ini Menteri Agama dalam Kep. Men. No. 44 Tahun 1978 didasarkan pada upaya stabilisasi nasional. Mengingat isu politik Islam pada

masa-masa tersebut merupakan isu yang rawan konflik, maka salah satu upaya pemerintah dalam menekan terjadinya gesekan antara pemerintah dan umat Islam adalah dengan mengatur pedoman penyiaran agama.

Dari keputusan tersebut dan konsep tri kerukunan, maka ada upaya pemerintah dalam mengeleminasi aspirasi umat Islam dalam bidang politik mencakup pula pada bidang organisasi dakwah Islam (organisasi sosial keagamaan). Pada hakikatnya pemerintah menghendaki adanya konsekuensi disiplin gerak organisasi sosial keagamaan, dengan tetap konsisten dalam tujuan dan peranannya. Namun pandangan tersebut secara tidak langsung menghambat peranan politisi Muslim. Mengingat keberadaan mereka selain sebagai pemimpin organisasi dakwah, mereka juga terjun dalam dunia politik seperti yang dialami oleh Muhammad Natsir dengan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia-nya (Natsir, 1978).

Kebijakan Orde Baru dalam melakukan depolitisasi Islam politik ini setidaknya didasarkan pada; *Pertama*, intervensi pemerintah merupakan cerminan

watak otoritarianisme Orde Baru. Salah satu syarat tidak tertulis dari rekrutmen politik dalam model negara otoriter adalah keinginan rezim untuk memobilisasi individu-individu atau kelompok yang bersedia kooperatif terhadap negara. *Kedua*, militer -komponen utama Orde Baru- menganggap bahwa partai Islam yang terorganisasi dengan baik dapat menjadi saingan utama dalam mempertahankan status quo. Partai Islam semacam ini berpotensi menggalang dukungan lebih besar daripada kelompok lain, karena secara statistik umat Islam di Indonesia merupakan komunitas terbesar. *Ketiga*, pengalaman sejarah mengingatkan bahwa, partai Islam yang terorganisasi dengan baik cenderung memaksa negara untuk memberlakukan hukum Islam sebagai konstitusi nasional. Bagi pemerintah Orde Baru, perdebatan tentang dasar negara selama ini merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh terulang lagi. Karenanya kekuatan politik umat Islam tidak diberi toleransi untuk hidup dengan normal karena terlanjur dipandang membahayakan persatuan nasional. *Keempat*, intervensi adalah pengungkapan dari adanya konflik budaya antara perwira-perwira militer utama di sekitar Soeharto yang kebanyakan berpandangan abangan, menghadapi

kelompok Muslim santri yang dinilainya sebagai kelompok yang berpandangan asing (Gaffar, 1992).

Pada masa selanjutnya, Menteri Agama Munawir Sadzali melanjutkan program Alamsyah Ratu Perwiranegara dengan konsep Kemitraan Pemerintah dengan ulama/tokoh agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Munawir Sadzali bahwa tugasnya sebagai Menteri Agama, pembantu Mandataris di bidang keagamaan adalah mengajak tokoh-tokoh agama Indonesia untuk mencari jalan bagaimana melaksanakan amanat GBHN 1983, tentang azas tunggal bagi ormas- ormas yang bersifat keagamaan tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman (Munawirsjadzali, 1983).

Upaya Munawir Sjadzali pada dasarnya merupakan sosialisasi secara lebih dalam penerapan azas tunggal Pancasila. Dalam beberapa kesempatan ia meyakinkan kepada umat Islam bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada prinsipnya Islam memberikan nilai-nilai dasar dan tidak memberikan preferensi pola politik yang baku. Karena itu terbuka peluang kebebasan bagi umat Islam untuk menentukan pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebudayaan masing-masing (Munawirsjadzali, 1983). Pandangan Munawir tersebut, pada hakikatnya mencerminkan ide pemisahan antara masalah politik dengan agama, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Agama sebelumnya. Dalam rangka melestarikan penerapan azas tunggal di kalangan ormas keagamaan, Departemen Agama menyelenggarakan Penataran P-4 bagi pemuka agama dan rohaniwan pada setiap propinsi, yang dimulai sejak 1983 hingga 1988 (Munawirsjadzali, 1986). Selain itu, dalam upaya pemerintah memperbaiki hubungan dengan kaum muslimin, Pemerintah melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh Islam, menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan, membantu dan memfasilitasi kebutuhan umat Islam dalam hal peribadatan. Setelah azas tunggal berhasil diterapkan pemerintah membalas pengorbanan umat Islam dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir keinginan umat Islam.

Penutup

Politik dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun aspek pendidikan yang tersentuh oleh kepentingan politik adalah pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Ta lim. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan politik terhadap pendidikan mempunyai signifikansi tersendiri, terlebih Majelis Ta lim dengan tingkat fleksibelitasnya memberikan ruang konflik kepentingan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun dari oposisi politiknya.

Upaya-upaya Pemerintah Orde Baru dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Majelis Ta lim agar tidak digunakan sebagai sarana politik praktis antara lain dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, dan Instruksi Menteri Agama RI. Nomor 5 tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meredam kepentingan-kepentingan politik Islam dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umat Islam.

Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut dilakukan melalui 1) pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh umat Islam, 2) membentuk organisasi-organisasi yang menampung aspirasi umat Islam seperti, ICMI, DKMI, KODI dan lain sebagainya, 3) merespon aspirasi umat Islam dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam, seperti pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan SDSB, dan lain-lain, 4) memenuhi aspirasi kepentingan umat Islam seperti membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok daerah, pembentukan Bank Muamalat, pengiriman da'i-da'i ke daerah transmigran, dan lain-lain.

Reaksi umat Islam dalam menanggapi kebijakan Pemerintah tersebut antara lain, dengan melakukan restrospeksi dalam penyampaian dakwah mereka, sehingga tidak menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun hal ini sempat menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, bahkan sempat menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dan umat Islam, terutama para politisi muslim.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, adalah terciptanya hubungan harmonis antara Pemerintah dan umat Islam. Sebagaimana terlihat dari kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umat Islam dan semakin banyaknya tokoh-tokoh umat Islam yang duduk baik di parlemen maupun Kabinet Pembangunan IV dan V. Meskipun demikian tidak seluruh umat Islam merasa puas dengan kepemimpinan Orde Baru, terutama bagi gerakan-gerakan yang memiliki ideologi yang berbeda seperti gerakan pembentukan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini tetap eksis dengan pola gerakan bawah tanahnya.

Pustaka Acuan

- Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam (Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizamiyah Dinasti Saljuq)*, Bandung: Citapustaka Media, cet. I, 2007.
- Alawiyah, Tutty AS, KH. Abdullah Syafi ie; Pribadi, *Visi dan Derap Perjuangannya*, dalam Tutty Alawiyah AS (ed), KH. Abdullah Syafi ie. Jakarta: Perguruan Islam As-Syafi iyah, 1999.
- Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin Indonesia 1980-2000*, Yogyakarta: Adipura, 2000.
- Ali, Fachry, dan Bachtiar Effendy, *Merambah jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Alwi Shihab, *Majelis Ta lim Kwitang di Masa Jepang*, <http://www.muslimdelft.nl/titian-ilmu/sejarah-islam/majelistaklim-habib-kwitangs-taklim-kwitang-di-masa-jepang/>, di akses tanggal 8 Juli 2015.

- Baedlawi, Azhari, *Profil KODI*, Edisi April, Jakarta: Dialog KODI, 2003.
- Buku Merah Putih, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, *G 30 S Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*, Jakarta: Setneg, 1994.
- Cahyono, Heru, *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama*, (Proyek perencanaan Peraturan Perundang-undangan Keagamaan Departemen Agama, Tahun Anggaran, 1984/1985).
- Djamas, Nurhayati, *Gerakan Kaum Muda Islam Masjid Salman, dalam Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Eliot, Thomas H., *Toward an Understanding of Public School Politics, in American Political Science Review*, Vol. 53, No. 4 December).
- Gaffar, Affan, *Javaness Voters*, Yogyakarta: UGM Press, 1992.
- Hadzami, Muhammad Syafi i, *Sumur Yang Tak Pernah Kering*, Jakarta: Yayasan Al „Asyirotusyafi iyah, cet. 1, 1999.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Hakim, Lukman, *70 Tahun H. Buchari Tamam: Menjawab Panggilan Risalah*, Jakarta: Media Dakwah, 1992.
- <http://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/31/kebijakan-orde-baru-terhadap-masyumi-dan-islam/>, didownload tanggal 18 Juli 2015.

- <http://www.islamic-centre.or.id/component/content/article/31-kajian/175-peran-majlistaklim-di-betawi/>. Di unduh pada tanggal 9 Juli 2015.
- [http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi iHadzami /](http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi%20iHadzami/), diakses tanggal 4 Juli 2015.
- Huda, Nurul, *et.al.*, *Pedoman Majelis Ta lim*, Jakarta: *Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat*, 1984.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1996.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Jakarta: PT. Hanindra, 1985.
- Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, *Himpunan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan*, Bandung: Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, 1997.
- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Lubis, Sofjan, *et.al.*, *30 Tahun GOLKAR*, Jakarta: DPP Golkar, 1994.
- Ma arif, Ahmad Syafi i, *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban*, Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.
- Marjono, Hartono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Mauladdawillah, Abdul Qadir Umar, *Tiga Serangkai Ulama Tanah Betawi*, Jakarta: Pustaka Basma, 1995.
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Mubarok, Zaki, *Geanologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta; LP3ES, 2008.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Panitia Peringatan Mohammad Natsir/Mohammad Roem 70 Tahun, *Mohammad Natsir 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, cet. 1, 1978.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1983., *Mengapa Umat Islam Indonesia Terima Azas Tunggal?*, (selanjutnya disingkat; "Mengapa Umat Islam", dalam Penuntun Amal Bakti, No. 27 Tahun III, Juni 1983.
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suminto, Husnun Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Supandi dan Achmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988).
- Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2003.
- Syukur, Abdul, *Gerakan Usroh di Indonesia: Kasus Peristiwa Lampung*

1989,

Tesis, Jakarta: UI, 2001.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tirtarahardja, Umar, dan La Sulo, S. L., *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. II, 2005.